

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Masyarakat memiliki dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan BUMDes melalui proses pemerataan modal, 51% modal berasal dari desa, sedangkan 49% berasal dari masyarakat (saham atau share) Dalam operasionalisasi, konsep perusahaan yang berasal dari budaya masyarakat digunakan. Potensi dan informasi pasar diperhitungkan saat melakukan bisnis. Terbukti bahwa keuntungan yang diperoleh meningkatkan kesejahteraan anggota (Equivalent Capital) dan masyarakat melalui kebijakan desa. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa semua bahu-membahu mewujudkannya.
2. Pemerintah memberikan kontribusi sumber daya keuangan kepada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Setiap perusahaan yang beroperasi di desa memiliki manfaat yang unik, yang ditentukan oleh kebutuhan dan peluang yang ada di komunitas tersebut. Agar Pemerintah Desa Kekeria berhasil menjalankan Badan Usamah Milik Desa, maka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan tentang hal tersebut. Dalam pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa organisasi pengelola BUMDes berbeda dengan organisasi yang membawahi Desa. Pemerintah. Organisasi pengelola BUMDes memiliki

struktur kepengurusan sebagai berikut: 1) Penasihat 2) Manajer Operasional,

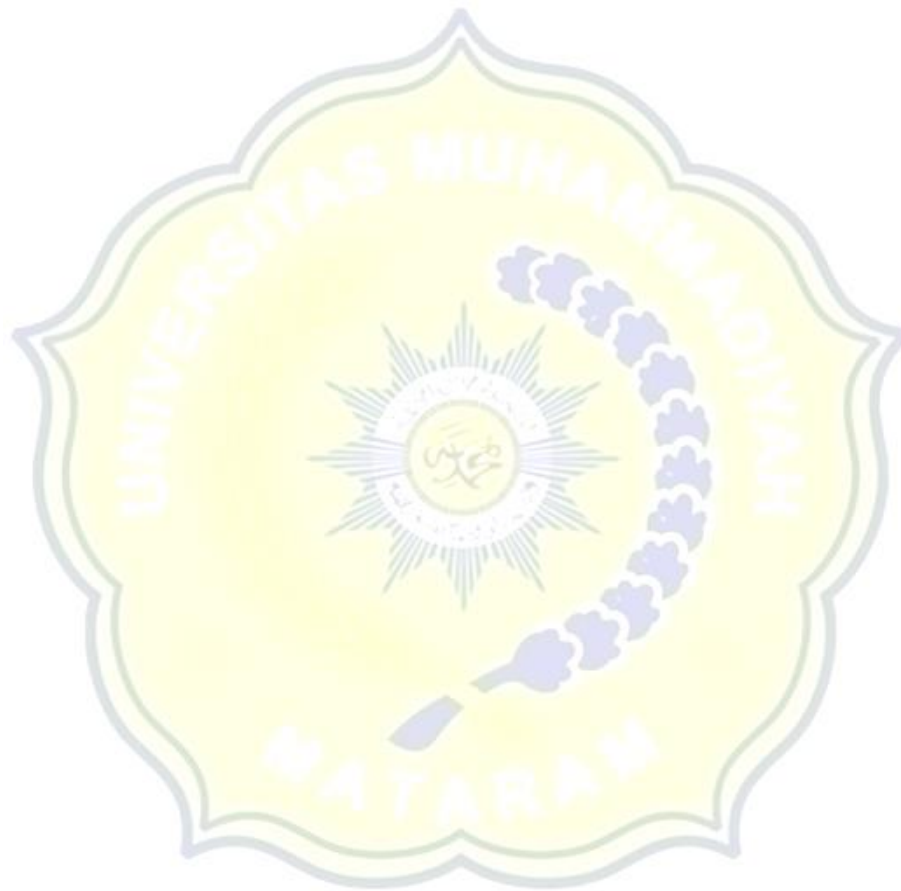
3. Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat Desa melalui proses musyawarah desa, sejalan dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Pengorganisasian tersebut dilakukan agar setiap pengurus BUMDes Kekerri mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan menempatkan dan membagi tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuannya sehingga tujuan dapat dicapai seefektif mungkin. Hal ini memastikan bahwa pengorganisasian dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap pengurus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Karena BUMDes Kekerri mengoperasikan tiga jenis perusahaan yang berbeda, yang masing-masing memerlukan pendekatan manajemen yang unik, penting bagi perusahaan untuk memiliki struktur organisasi yang efisien dan memastikan bahwa tanggung jawab utama dari setiap departemen dijalankan.

5.2 Saran

Dengan melihat hasil penelitian, peneliti menyarankan :

1. Memberikan perhatian penuh kepada pihak pemerintah untuk meningkatkan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

2. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., & Kushartono, E. W. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 15.
- Bahril, S. A. (2017). Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa (UIN Alauddin Makassar; Vol. 53). Retrieved from [http://repositori.uinalauddin.ac.id/5351/1/SAMSUL BAHRI](http://repositori.uinalauddin.ac.id/5351/1/SAMSUL%20BAHRIL.pdf)L.pdf
- Benny dan Tetty. (2020). Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. *Insan Cendekia Mandiri*.
- Indrajaya, L. P. P. A. (2016). Luh Putu Putri Awandari. *Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja*, *E-Jurnal E*, 1435–1462.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017*, 41–51.
- Jepri, A. (2019). Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 303–310.
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA.
- Leutikaprio. Ihsan, A. Nur. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep.
- Lumintang, J., & Waani, F. J. (2019). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 15.
- Nasdian, Fredian Tonny. Pengembangan masyarakat. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014 - 317 halaman
- Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintahan desa
- Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perKoperasian

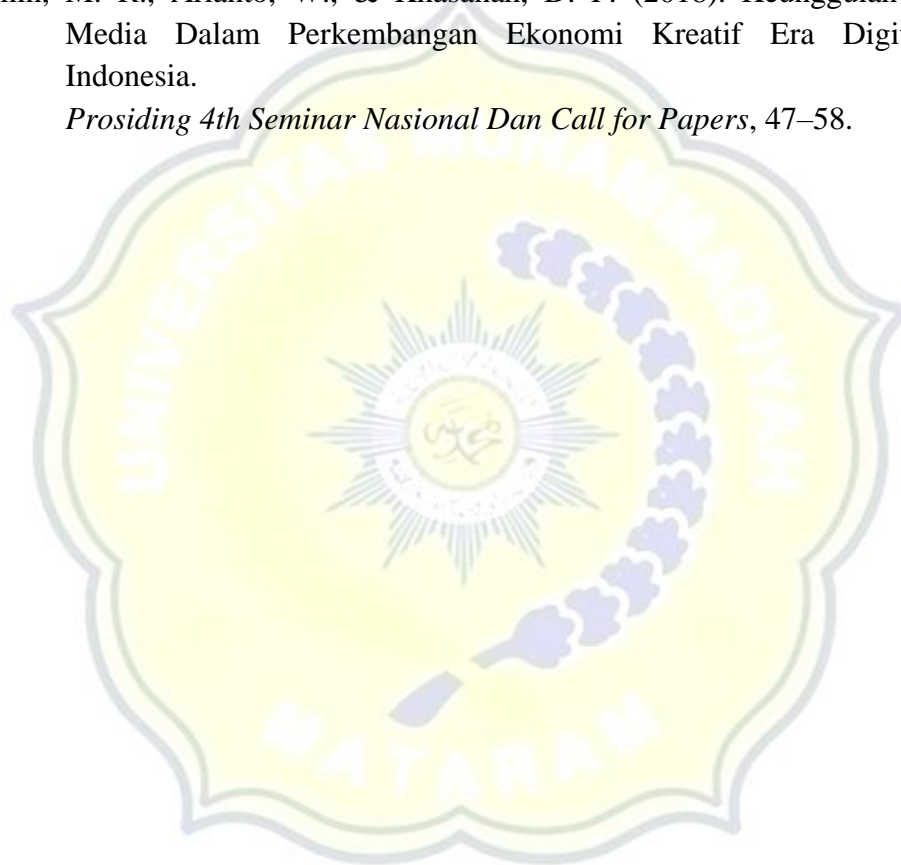
Peraturan Bupati (PERPUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 58 Tahun 2019
Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

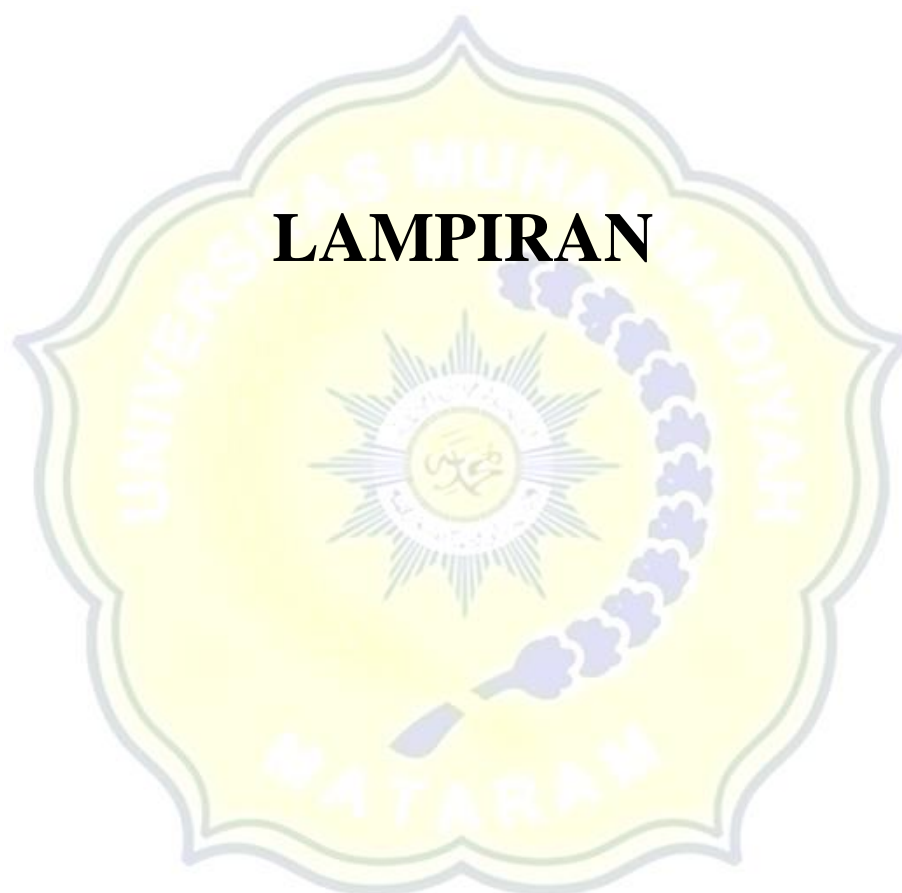
Prasetyo, R. A. (2017). "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kekerri Kecamatan ... *Jurnal Dialektika Volume, 11*(March 2016), 86–100.

Ramadana, C., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, 1*(6), 1068–1076.

Sholihin, M. R., Arianto, W., & Khasanah, D. F. (2018). Keunggulan Sosial Media Dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif Era Digital Di Indonesia.

Prosiding 4th Seminar Nasional Dan Call for Papers, 47–58.





LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Wawancara Sekertaris Desa H.Mukrim, ST



Wawancara Dengan Kepala Desa Sultan, SP. Pd.I



Wawancara Sekertaris Desa H.Mukrim, ST

